



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIK DWI HASTUTI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 883924

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 968.000.000

1. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 87.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 204.946.865

F. HARTA LAINNYA Rp. 77.000.000

Sub Total Rp. 1.442.046.865

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.442.046.865



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.